

STUDI LITERATUR SEKTOR INFORMAL DI PERKOTAAN

Firdausy, Carunia Mulya. (1995). **“Model dan Kebijakan Pengembangan Sektor Informal Pedagang Kaki Lima.”** Pengembangan Sektor Informal Pedagang Kaki Lima di Perkotaan. Jakarta: Dewan Riset Nasional dan Bappenas bekerjasama dengan Puslitbang Ekonomi dan Pembangunan LIPI.

Ringkasan:

Tulisan ini membahas dua hal. Pertama model pengembangan sektor informal PKL perkotaan yang diambil dari hasil studi di empat kota (Bandung, Yogyakarta, Semarang, dan Surabaya). Model pengembangan ini berupaya untuk mengoptimalkan potensi sosial-ekonomi sektor informal PKL¹ dan mengurangi permasalahan yang ditimbulkannya². Kedua, rumusan kebijakan yang harus ditempuh pemerintah agar model pengembangan PKL dapat mencapai tujuan.

Dibagian awal penulis mendeskripsikan karakteristik dan masalah yang dihadapi PKL.

Karakteristik PKL:

1. Aspek ekonomi: PKL merupakan kegiatan ekonomi skala kecil dengan modal relatif minim. Aksesnya terbuka sehingga mudah dimasuki usaha baru, konsumen lokal dengan pendapatan menengah ke bawah, teknologi sederhana/tanpa teknologi, jaringan usaha terbatas, kegiatan usaha dikelola satu orang atau usaha keluarga dengan pola manajemen yang relatif tradisional. Selain itu, jenis komoditi yang diperdagangkan cenderung komoditi yang tidak tahan lama seperti makanan dan minuman.
2. Aspek Sosial-budaya: sebagian besar pelaku berpendidikan rendah dan migran (pendatang) dengan jumlah anggota rumah tangga yang besar. Mereka juga bertempat tinggal di pemukiman kumuh.
3. Aspek Lingkungan: kurang memperhatikan kebersihan dan berlokasi di tempat yang padat lalu lintas.

Permasalahan dibagi menjadi masalah eksternal dan internal.

Masalah eksternal: banyaknya pesaing usaha sejenis, sarana dan prasarana perekonomian yang tidak memadai, belum adanya pembinaan yang memadai, keterbatasan mengakses kredit.

Masalah internal: kelemahan dalam struktur permodalan, organisasi dan manajemen, keterbatasan komoditi yang dijual, minimnya kerjasama usaha, rendahnya pendidikan usaha dan kualitas SDM.

Ciri-ciri dan permasalahan yang dihadapi PKL di empat kota ini tidak banyak berbeda dengan temuan di beberapa studi lainnya (lihat Moir 1978; Sasono 1989; Sethuraman 1989; Ekasari 1993). Hal ini membuktikan bahwa dalam rentang waktu lebih dari 10 tahun, kebijakan dan program pemerintah masih belum mampu mengatasi berbagai masalah yang dialami sektor informal PKL. Padahal jumlah PKL dari tahun ke tahun disinyalir terus mengalami peningkatan akibat tingginya angka urbanisasi sementara jumlah penyerapan TK di sektor formal sangat terbatas.

Ketidakberhasilan kebijakan dan program pemerintah dalam mengembangkan PKL terkait dengan berbagai hal, seperti (1) pendekatan pemerintah yang masih bersifat “supply-side” oriented (pengaturan, penataan, dan bantuan terhadap PKL dilakukan tanpa melakukan komunikasi dan kerjasama dengan PKL sendiri), (2) pelaksanaan kebijakan/program bagi PKL sarat dengan keterlibatan berbagai aparat “pembina,” dan (3) penertiban dan pengendalian PKL lebih didasari pada adanya keterlibatan pemerintah dalam pelaksanaan proyek daripada

¹ Mengurangi “surplus of unskilled laborers,” alternatif penghasilan bagi penduduk marjinal, dan produsen bagi barang-barang dan jasa yang diperlukan oleh penduduk berpenghasilan rendah.

² Meningkatnya biaya fasilitas-fasilitas umum perkotaan, mendorong lajunya arus migrasi dari desa ke kota, menjamurnya pemukiman kumuh, dan meningkatnya kriminalitas.

semangat membangun sektor informal sebagai salah satu basis perekonomian rakyat (lihat Sethuraman 1989; Sasono 1989).

Hal konkrit yang bisa dilihat akibat berbagai hal tersebut adalah kesulitan PKL untuk mengakses modal/kredit yang disediakan pemerintah, sedikitnya PKL yang pernah mengikuti pembinaan usaha karena kurangnya sosialisasi pemerintah mengenai program ini, dan penolakan relokasi.

Model Pengembangan Sektor Informal PKL

Berdasarkan berbagai ciri, masalah dan kegagalan kebijakan/program pemerintah dalam menangani PKL tersebut, penulis merekomendasikan model pengembangan sektor informal PKL melalui kerjasama PKL, pihak swasta, dan pemerintah. Inisiatif pembentukan organisasi dalam suatu lokasi usaha datang dari PKL sendiri. Pemberian modal dari pihak swasta dan/atau pemerintah bisa dilakukan melalui organisasi PKL (koperasi, kelompok dagang, dsb) atau secara terpisah kepada PKL yang tidak bergabung ke dalam wadah ini. Kemudian melalui kebijakan PEMDA memberikan perlindungan, pembinaan, dan bimbingan kepada setiap PKL (anggota maupun non-anggota).

Kebijakan Pemerintah

Kebijakan yang kondusif menjadi dasar utama agar model pengembangan sektor informal PKL bisa mencapai tujuan yang diharapkan. Penulis membagi dua level kebijakan yaitu di tingkat makro dan mikro. Kebijakan makro dapat berupa pengakuan dan perlindungan PEMDA terhadap keberadaan sektor ini diperkotaan. Hal yang mendesak untuk dilakukan adalah merubah iklim kebijakan pemerintah dari yang bersifat elitis menjadi non-elitis kerakyatan. Kebijakan non-elitis dapat diwujudkan dengan dimantapkannya aspek hukum perlindungan bagi keberadaan PKL, perbaikan kelembagaan dan administrasi ke arah non-birokratis dan mempermudah akses PKL terhadap sumber-sumber ekonomi yang tersedia. Di tingkat mikro diperlukan upaya untuk mengkaitkan produktivitas dan tingkat pendapatan usaha PKL. Cara yang dapat ditempuh: (1) peningkatan efisiensi ekonomi dari usaha PKL, (2) peningkatan produksi usaha dagang, (3) meningkatkan usaha PKL yang kurang potensial menjadi usaha yang lebih ekonomis potensial.

Bromley, Ray. (1979). "Introduction--The Urban Informal Sector: Why Is It Worth Discussing?" *The Urban Informal Sector: Critical Perspectives on Employment and Housing Policies*. Oxford: Pergamon Press.

Ringkasan:

Tulisan ini mengkaji relevansi model dualistis kegiatan ekonomi dan usaha yang diterapkan di negara-negara dunia ketiga. Tulisan difokuskan pada asal muasal, difusi, dan kekurangan dari model klasifikasi formal/informal. Sembilan kekurangan utama telah berhasil diidentifikasi. Kemudian, difusi yang serba cepat terhadap konsep informal terkait dengan ketepatan waktu dan tempat presentasinya, pentingnya institusi-institusi kunci dalam difusi gagasan ini, dan relevansi konsepnya terhadap rekomendasi kebijakan yang mungkin (feasible) atau aman secara politis bagi konsultan dan organisasi-organisasi internasional.

Asal muasal

Diawali dengan pembagian kegiatan ekonomi dan kerja ke dalam sektor tradisional dan modern. Pendekatan dualistis ini telah menjadi dasar teoritis sebagian besar literatur dan hampir dilembagakan dalam analisa-analisa liberal dan neo-klasik ekonomi dunia ketiga. Di awal tahun 1970an, Hart mempresentasikan sebuah makalah tentang kerja perkotaan di Ghana. Dia memperkenalkan istilah baru, membagi ekonomi menjadi 'informal' (perpanjangan dari konsep tradisional) dan 'formal' (kurang lebih sama dengan modern) sektor dan menekankan pada pentingnya kerja sendiri, usaha-usaha kecil, dan tidak adanya catatan statistik sektor informal.

Dalam laporan ILO tentang Kenya, sektor informal dan formal dibedakan sebagai berikut. Kegiatan-kegiatan informal adalah sebuah acara untuk melakukan sesuatu yang dicirikan: (1) mudah masuk, (2) bersandar pada sumber daya lokal, (3) usaha milik keluarga, (4) operasi skala kecil, (5) padat karya dan *adapted technology*, (6) ketrampilan diperoleh diluar sistem formal

sekolah, (7) tidak diatur dan pasar kompetitif. Sebagai tambahan informal sektor juga kerap diabaikan, jarang didukung, kadang diatur dan kadang secara aktif dihambat oleh pemerintah.

9 Kekurangan klasifikasi formal/informal

1. Pembagian seluruh kegiatan ekonomi ke dalam dua kategori terlalu simplistik. Pendekatan yang menarik adalah untuk mengklasifikasikan kegiatan usaha sebagai sebuah kelanjutan antara dua sisi yang berseberangan. Hal ini bisa melihat usaha-usaha yang berada di antara formal/informal dan proses-proses transisi yang terjadi.
2. Model klasifikasi ini tidak mampu menjelaskan kegiatan-kegiatan yang memiliki sebagian ciri formal dan informal.
3. Banyak pengguna klasifikasi ini berasumsi bahwa dua sektor ini terpisah dan mandiri. Padahal kasus memperlihatkan bahwa kedua sektor ini terus menerus berinteraksi, berbagai bagian dalam sebuah sektor mungkin didominasi atau diciptakan oleh bagian dari sektor lain.
4. Pemberian kebijakan tunggal bagi seluruh sektor informal. Padahal kegiatan usaha di sektor informal sangat beraneka ragam sehingga memerlukan kebijakan yang berbeda-beda.
5. Terdapat kecenderungan melihat sektor informal sebagai kegiatan usaha eksklusif di area perkotaan dan mempergunakan istilah sektor tradisional pedesaan untuk menggambarkan kegiatan-kegiatan di area non-perkotaan. Padahal bukannya tidak mungkin untuk menemukan kegiatan-kegiatan serupa di area pedesaan. Sektor informal pedesaan seharusnya mendapat perhatian yang sama besarnya dengan sektor informal perkotaan.
6. Sebagian besar tulisan yang mendefinisikan dan menggunakan klasifikasi ini tidak berhasil menjelaskan komponen-komponen lain dari keseluruhan sistem nasional yang ada.
7. Sektor informal kerap dianggap tidak memiliki masa depan. Ketika sektor ini didefinisikan dalam pengertian sektor yang kurang mendapat dukungan pemerintah, tidak tercatat secara resmi, dan beroperasi diluar aturan pemerintah, secara otomatis dukungan pemerintah akan diarahkan untuk mengformalisasi sektor ini. Pendekatan ini juga berasumsi bahwa satu-satunya hambatan sektor informal untuk tumbuh adalah sikap negatif dari pemerintah terhadap sektor ini. Oleh karena itu, dukungan pemerintah dianggap bisa menjadi jaminan sukses. Hal ini mengabaikan kompetisi yang kompleks dan hubungan tidak seimbang antara usaha kecil dan usaha besar dan berbagai strategi monopoli untuk menekan kompetisi usaha kecil.
8. Pembagian formal/informal tidak dapat diterapkan pada kebanyakan orang yang bekerja di dua sektor pada tahapan yang berbeda dalam siklus hidupnya, sepanjang tahun bahkan sepanjang hari. Demikian juga dalam rumah tangga, ketika sebagian anggota RT kerja di sektor informal sementara lainnya di sektor formal. Patut dipertanyakan juga apakah klasifikasi ini seharusnya diterapkan pada kegiatan (dalam laporan ILO Kenya) padahal kegiatan yang sama bisa dilakukan baik di sektor formal maupun informal. Tampaknya hanya perusahaan yang bisa secara meyakinkan diklasifikasikan kedalam salah satu sektor, dan klasifikasi perusahaan ke deskripsi kegiatan, orang, RT, dan lingkungan pertetanggaan terus menerus membawa pada kebingungan dan kesalahan.
9. Terdapat kecenderungan untuk menyamakan sektor informal perkotaan dengan 'urban poor.' Padahal tidak semua yang bekerja di sektor informal adalah orang miskin demikian juga sebaliknya.

Secara kasar terdapat lima sikap terhadap model dualisme sektor formal/informal:

1. Tidak tahu menahu atau apatis
2. Advokasi keras kepala; mereka yang percaya bahwa literatur yang ada baik dan konsep maupun kebijakan tidak memerlukan modifikasi.
3. Advokasi fleksibel; mereka yang percaya bahwa literatur yang tersedia memiliki kekurangan yang besar, namun berharap untuk merevisi konsep dan menggunakan kerangka konseptual ini dalam penelitian dan formulasi kebijakan.

4. Oposisi sedang; mereka yang percaya bahwa dualisme formal/informal hanya sekedar tahap akhir dari proses penelitian dan formulasi kebijakan yang masih terus berlangsung, dan menggunakan terminologi dan gagasan yang ada sampai muncul yang lebih baik.
5. Oposisi kuat; mereka yang percaya bahwa dualisme formal/informal adalah tidak tepat dan tidak sesuai. Mereka memilih untuk bekerja dengan kerangka konseptual yang berbeda atau tanpa klasifikasi kegiatan usaha.

Menurut Bromley, banyak akademisi, pekerja internasional, dan pemerintah berada dalam kelompok 1 dan 2.

Pentingnya perdebatan mengenai sektor informal

Secara konseptual:

The initial writings on informal sector had so many conceptual errors, inconsistencies and blind spots. Why? The terminology and associated concepts happened to be put forward in propitious places and at propitious times.

Secara praktis:

Banyak orang menganggap validitas intelektual konsep sektor informal kalah penting dibandingkan dampak kebijakannya. Dukungan sektor informal muncul untuk menawarkan kemungkinan “menolong orang miskin tanpa menimbulkan ancaman besar bagi orang kaya.”

Mengapa model dualistik formal/informal banyak didiskusikan di tahun 1970an? Ini disebabkan oleh banyaknya publikasi skala besar dan distribusi hasil-hasil penelitian dan rekomendasi kebijakan oleh ILO dan penting IDS-Sussex sebagai sebuah pusat penyebarluasan gagasan. Dan yang lebih penting adalah keterkaitan antara diskusi kebijakan sektor informal dengan topik diskusi kebijakan lainnya, seperti “Redistribution with growth”, “the Urban Crisis”, “Reaching the Poorest of the Poor”, dsb.

Bromley, Ray. (1979). “Organization, Regulation, and Exploitation in the So-Called ‘Urban Informal Sector’: the Street Traders of Cali, Colombia.” The Urban Informal Sector: Critical Perspectives on Employment and Housing Policies. Oxford: Pergamon Press.

Ringkasan:

Tulisan ini mengkaji salah satu jenis pekerjaan jasa (pedagang kaki lima) di Cali, Colombia yang disebut “sektor informal” yang menekankan pada kaitan-kaitan horisontal dan vertikal yang ada, terutama pentingnya penjualan atas komisi³ (penjual koran, es krim, dsb) dan pekerjaan yang tergantung⁴. Dua jenis pekerjaan ini berpotensi eksploitasi. Banyak PKL yang tidak lebih daripada karyawan perusahaan besar yang terikat. Mereka bekerja untuk memperoleh keuntungan yang relatif rendah dan berubah-ubah dan banyak menanggung resiko dalam kegiatan-kegiatan yang tidak stabil dan kadang-kadang ilegal (tidak sah). “Para majikan” menghindari keterikatan apapun dengan “para karyawan” itu; menghindari diri dari usaha pemerintah untuk mengatur kesempatan kerja melalui jaminan sosial, jaminan pekerjaan, dan peraturan upah minimum.

Meskipun PKL menurut arti harfiahnya adalah perusahaan kecil yang mandiri, namun ia terikat dengan jaringan sosial ekonomi yang rumit. Berhubungan dengan banyak pihak; penyalur, saingan, langganan, pemberi pinjaman, pemberi perlengkapan, petugas pemerintah, dan berbagai pranata resmi maupun privat. Keberhasilan PKL membutuhkan banyak ketrampilan dan jaringan sosial yang kuat.

Sebagian besar PKL tidak berhasil dalam menjalankan dan memperluas usahanya. Permasalahan PKL memerlukan perubahan lebih mendalam dan lebih mendasar daripada hanya

³ Pekerja borongan pada perusahaan besar.

⁴ PKL yang mendapatkan barang dagangan mereka dari salah seorang penyalur. Penyalur ini biasanya akan memberikan kredit atau meminjamkan perlengkapan kepada “penjual-penjual tetapnya.”

sekedar pemberian kredit murah, latihan ketrampilan dan bantuan teknis pada perusahaan-perusahaan sektor informal tertentu yang hanya bisa membantu sejumlah kecil rumah tangga agar menduduki tingkat sosio-ekonomi yang lebih tinggi. Perubahan dalam kaitan-kaitan vertikal masih minim, seperti peraturan pemerintah dan hubungan kelembagaan yang mempengaruhi perusahaan-perusahaan kecil, keberhasilan sejumlah usaha kecil bisa disertai oleh hancur atau makin lemahnya lebih banyak usaha lain. Setiap kebijakan harus memperhatikan sistem keseluruhan bukan hanya bagian hirarki yang rendah.

Hart, Keith. (1991). **"Sektor Informal."** Chris Manning dan Tadjuddin Noer Effendi (eds). Urbanisasi, Pengangguran, dan Sektor Informal di Kota. Jakarta: YOI. 78-89.

Ringkasan:

Tulisan ini didasarkan pada hasil penelitian di Ghana. Penulis memaparkan hasil temuannya berdasarkan tipologi kesempatan memperoleh penghasilan di kota, yaitu (1) kesempatan memperoleh penghasilan yang formal, melalui gaji dari negara, gaji dari sektor swasta, dan tunjangan-tunjangan pensiun, tunjangan pengangguran. (2) kesempatan memperoleh penghasilan yang informal baik yang sah ((a) kegiatan-kegiatan primer dan sekunder, seperti pertanian, perkebunan yang berorientasi pasar, penjahit, dsb, (b) usaha tersier dengan modal relatif besar, seperti spekulasi barang-barang dagangan, kegiatan sewa-menyewa, dsb, (c) distribusi kecil-kecilan, seperti pedagang pasar, pedagang kelontong, PKL, dsb) maupun tidak sah (jasa: penadahan barang curian, pelacuran, mucikari, dsb. Transaksi: pencurian dan perjudian).

Penulis juga menawarkan dua cara melihat sektor informal. Pertama, dari sudut pandang individu sebagai sumber potensial untuk memperoleh penghasilan; kedua, dari sudut pandangan jumlah total pendapatan dan pengeluaran yang mengalir dalam perekonomian kota. Yang juga penting untuk dipertimbangkan adalah tingkat keteraturan yang memungkinkan keterlibatan dalam kegiatan-kegiatan informal. Menurut Hart, "hanya dalam hal keterlibatan yang teratur kita bisa berbicara tentang "lapangan kerja informal" yang berbeda dari arus pendapatan yang tidak tetap. Analisa tulisan ini terbatas pada mereka yang berusaha sendirian ataupun bersama-sama.

Temuan penting lainnya dari tulisan ini adalah adanya pemusatan kelompok etnis yang mencegah masuknya orang lain ke dalam perdagangan komoditi tertentu. Lebih dari itu, peranan perdagangan di Ghana (sebagai pekerjaan utama ataupun sampingan) sanggup mendatangkan keuntungan yang jauh lebih tinggi daripada pekerjaan upahan yang tersedia bagi rakyat miskin di kota.

Mazumdar, Dipak. (1991). **"Sektor Informal di Kota: Analisis Empiris terhadap Data dari Berbagai Negara di Dunia Ketiga."** Chris Manning dan Tadjuddin Noer Effendi (eds). Urbanisasi, Pengangguran, dan Sektor Informal di Kota. Jakarta: YOI. 109-137.

Ringkasan:

(dari pengarang). Tulisan ini lebih memusatkan perhatian pada implikasi distribusi pendapatan dalam ekonomi kota yang terbagi atas dua macam pasar tenaga kerja, yaitu sektor formal dan sektor informal. Meskipun belum ada penelitian yang sistematis dalam bidang ini, namun dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Ada semacam seleksi pekerja dalam sektor informal. Sebagian pekerja dalam sektor ini tidak termasuk dalam kelompok usia kerja 25-50 thn, kebanyakan wanita dan berpendidikan rendah.
2. Tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa sektor informal memainkan suatu peranan penting untuk melicinkan jalan masuk ke pasar tenaga kerja di kota bagi kaum migran baru.

3. Rendahnya penghasilan dalam sektor informal sebagian disebabkan oleh faktor-faktor tertentu yang mempengaruhi tipe angkatan kerja dalam sektor ini. Bagaimanapun, hal ini tidak dapat digunakan sebagai suatu argumen untuk menolak pendapat bahwa pembagian pasar kota atas sektor formal dan informal cenderung memperbesar ketimpangan distribusi pendapatan di kota. Sepanjang kelompok pekerja mendapat kesulitan untuk memperoleh pekerjaan dengan upah lebih tinggi, mereka cenderung menekan harga penawaran (upah) dan pendapatan dalam sektor informal.
4. Terdapat perbedaan yang besar dalam sektor informal, dan pada kelompok-kelompok penting dalam sektor ini. Perbedaan dalam sektor ini perlu dijadikan suatu topik penelitian lebih lanjut. Pada saat ini, kita tidak tahu berapa banyak orang dalam sektor ini mengalami mobilitas dan meningkatkan penghasilannya.
5. Efek kumulatif dari berbagai bukti yang berbeda-beda ini menunjukkan adanya mitos populer bahwa sebagian besar massa berpenghasilan rendah terdapat dalam kantong-kantong ekonomi kota tertentu-sektor informal, pekerja usaha sendiri, atau kegiatan tersier yang perlu ditolak. Khususnya, suatu proporsi yang sangat kecil dari angkatan kerja di kota mempunyai tingkat penghasilan yang sama dengan atau lebih rendah dari tingkat penghasilan kaum miskin di desa.

Sethuraman, S.V. (1991). "Sektor Informal di Negara Sedang Berkembang." Chris Manning dan Tadjuddin Noer Effendi (eds). Urbanisasi, Pengangguran, dan Sektor Informal di Kota. Jakarta: YOI. 90-108.

Ringkasan:

Dalam tulisan ini sektor informal dianggap sebagai suatu manifestasi dari situasi pertumbuhan kesempatan kerja di negara sedang berkembang. Kegiatan memasuki usaha kecil di kota terutama bertujuan untuk mencari kesempatan kerja dan pendapatan daripada memperoleh keuntungan. Mereka yang terlibat sektor ini pada umumnya miskin, berpendidikan sangat rendah, tidak terampil, dan kebanyakan adalah para pendatang. Berdasarkan hal ini, sektor informal harus dipandang sebagai unit-unit usaha berskala kecil yang terlibat dalam produksi dan distribusi barang-barang yang masih dalam suatu proses evolusi daripada dianggap sebagai perusahaan yang berskala kecil dengan input modal dan pengelolaan yang besar.

Penulis menyatakan bahwa konseptualisasi sektor informal tersebut belum dapat menyelesaikan masalah definisi. Masih diperlukan beberapa definisi untuk menentukan batas sektor ini, baik dari sudut pandang operasional maupun penelitian. Ciri penting untuk membedakan sektor informal dari semua kegiatan ekonomi sektor-sektor lainnya adalah skala operasi. Alat ukur yang tepat untuk mengukur skala operasi adalah jumlah orang yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Untuk kepentingan tulisan ini, penulis mengklasifikasikan unit-unit usaha yang melibatkan 10 orang ke bawah ke dalam sektor informal.

Bibliography:

Books

Bromley, Ray (ed). (1979). The Urban Informal Sector: Critical Perspectives on Employment and Housing Policies. Oxford: Pergamon.

Bromley, Ray. (1979). "Introduction–The Urban Informal Sector: Why Is It Worth Discussing?" The Urban Informal Sector: Critical Perspectives on Employment and Housing Policies. Oxford: Pergamon Press.

Bromley, Ray. (1979). "Organization, Regulation, and Exploitation in the So-Called 'Urban Informal Sector': the Street Traders of Cali, Colombia." The Urban Informal Sector: Critical Perspectives on Employment and Housing Policies. Oxford: Pergamon Press.

Firdausy, Carunia Mulya (ed). (1995). Pengembangan Sektor Informal Pedagang Kaki Lima di Perkotaan. Jakarta: Dewan Riset Nasional dan Bappenas bekerjasama dengan Puslitbang Ekonomi dan Pembangunan LIPI.

Firdausy, Carunia Mulya. (1995). "Model dan Kebijakan Pengembangan Sektor Informal Pedagang Kaki Lima." Pengembangan Sektor Informal Pedagang Kaki Lima di Perkotaan. Jakarta: Dewan Riset Nasional dan Bappenas bekerjasama dengan Puslitbang Ekonomi dan Pembangunan LIPI.

Hart, Keith. (1991). "Sektor Informal." Chris Manning dan Tadjuddin Noer Effendi (eds). Urbanisasi, Pengangguran, dan Sektor Informal di Kota. Jakarta: YOI. 78-89.

Manning, Chris dan Tadjuddin Noer Effendi (eds). (1991). Urbanisasi, Pengangguran, dan Sektor Informal di Kota. Jakarta: YOI.

Mazumdar, Dipak. (1991). "Sektor Informal di Kota: Analisis Empiris terhadap Data dari Berbagai Negara di Dunia Ketiga." Chris Manning dan Tadjuddin Noer Effendi (eds). Urbanisasi, Pengangguran, dan Sektor Informal di Kota. Jakarta: YOI. 109-137.

Sethuraman, S.V. (1991). "Sektor Informal di Negara Sedang Berkembang." Chris Manning dan Tadjuddin Noer Effendi (eds). Urbanisasi, Pengangguran, dan Sektor Informal di Kota. Jakarta: YOI. 90-108.

Journals

Donovan, Michael. G. (2008). "Informal Cities and the Contestation of Public Space: the Case of Bogota's Street Vendors, 1988-2003." Urban Studies 45 (1): 29-51.